



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENUNTASAN BUTA AKSARA UNTUK PENGUATAN LITERASI NASIONAL

Yulia Indahri

Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peringatan Hari Aksara Internasional ke-59 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 26 September 2025 menegaskan pentingnya kesalehan literasi digital sebagai pilar peradaban. Meski angka buta aksara nasional telah menurun dari 1,9 persen (2020) menjadi 0,92 persen (2025), jumlah absolut warga buta aksara masih signifikan mengingat populasi Indonesia yang besar. Tantangan juga tampak pada ketimpangan akses di daerah terpencil, keterbatasan sarana, rendahnya minat baca, serta kesenjangan baru akibat disrupsi digital.

Dalam forum tersebut, perwakilan UNESCO mengingatkan bahwa literasi adalah hak asasi manusia sekaligus fondasi pembangunan berkelanjutan. Tantangan literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis mengakses informasi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, etika bermedia, serta inklusi kelompok marginal. Empat prioritas UNESCO—memperluas akses teknologi, mendukung guru, mengembangkan kurikulum inklusif, dan memperkuat pembelajaran sepanjang hayat—ditegaskan sebagai arah kebijakan global.

Pemerintah Indonesia melalui Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan perangkat *interactive flat panel* untuk digitalisasi pembelajaran, memperluas program revitalisasi satuan pendidikan nonformal, serta menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Keaksaraan bagi 35 ribu penerima dengan bantuan Rp600.000 per penerima. Bantuan ini tidak hanya menysar keaksaraan dasar, melainkan juga keterampilan hidup, termasuk program keaksaraan usaha mandiri dan kursus keterampilan kerja. Program pemberdayaan remaja dan perempuan dewasa turut diperkuat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sehingga kelompok ini mendapat akses pada kecakapan hidup dan kemandirian.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan angka buta aksara hampir setengahnya. Namun, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa masih ada kabupaten dengan tingkat buta aksara tinggi yang memerlukan perhatian serius. Komitmen pemerintah adalah “tidak meninggalkan satu warga pun,” sehingga literasi harus dipandang bukan sekadar program teknis, tetapi sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Selain tantangan di wilayah terpencil, masalah literasi juga muncul di perkotaan. Rendahnya minat baca, keterbatasan sumber belajar, serta disrupsi digital menyebabkan kesenjangan baru. Oleh karena itu, kebijakan literasi digital diarahkan tidak hanya untuk menutup jurang akses, tetapi juga menumbuhkan budaya literasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintah menekankan tiga fokus utama: penguatan literasi dasar dan lanjutan, pemberdayaan komunitas melalui program remaja dan perempuan, serta kolaborasi multilateral yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan media.

Apresiasi khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka buta aksara, serta organisasi mitra seperti PKBM, IPABI, Forum Tutor, dan Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang menjadi garda terdepan gerakan literasi di akar rumput. Narasi dari TBM Riau Berkarya—yang menampilkan dongeng anak “Keseruan Udin dan Jaka”—menegaskan pentingnya peran komunitas lokal. TBM tidak hanya menjadi ruang membaca, tetapi juga pusat kreativitas, pembelajaran digital, dan penanaman pola pikir bertumbuh (*growth mindset*) sejak dini.

Kolaborasi didorong untuk memperkuat Gerakan Literasi Nasional. Literasi tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan kesadaran, keterampilan, dan modal daya saing. Melalui kesalehan literasi digital, Indonesia diharapkan dapat melahirkan generasi emas yang cerdas, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global.

Atensi DPR

DPR RI perlu memberi perhatian serius terhadap penuntasan buta aksara sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikdasmen perlu mendorong penguatan program literasi dasar melalui fungsi legislasi, termasuk memastikan regulasi pendidikan mengintegrasikan target penurunan buta aksara serta memperkuat peran pendidikan nonformal. Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mengawal alokasi dana afirmatif bagi daerah dengan prevalensi buta aksara tinggi, mencakup dukungan penyediaan sarana belajar, perekrutan dan pelatihan tutor, serta distribusi bahan ajar kontekstual. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI dapat membentuk panitia kerja di Komisi X untuk memantau efektivitas implementasi program dan memastikan capaian penurunan buta aksara berlangsung berkelanjutan.

Sumber

antara.com, 26 & 27 September 2025;
detik.com, 26 September 2025;
kemendikdasmen.go.id, 26 September 2025; dan
kompas.id, 27 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*